

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inti demokrasi adalah upaya menjamin kesetaraan politik bagi seluruh warga, tak terkecuali kelompok marjinal dan kaum minoritas. Meskipun secara demografis mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan, mereka tak lebih dari mayoritas bisu – kelompok besar yang termarginalisasi secara politis, sosial, kultural dan ekonomis – yang hampir selalu absen pada proses-proses pengambilan keputusan.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Merupakan indikator bahwa isu gender yang terus bergulir belum mendapatkan perhatian khusus dalam berbagai bidang pembangunan, sehingga Pemerintah Pusat Menetapkan pijakan politis yang membuka peluang bagi perempuan Indonesia Untuk berpartisipasi aktif di dalam pembangunan termasuk pembangunan politik yang berwawasan gender. Untuk membicarakan upaya memperkuat partisipasi politik perempuan di Indonesia kita harus menempatkannya di dalam konteks transisi yang tengah dialami bangsa Indonesia menuju ke sistem politik yang lebih demokratis.

Menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas

dari gejala konflik dan kerja sama.¹ Demikianlah politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang, politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan-kegiatan perseorangan atau individu. Dalam hal ini individu dapat dengan leluasa berada dalam dunia politik entah itu laki-laki maupun perempuan.

Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Dalam kehidupan manusia sering melakukan yang namanya politik entah itu politik dalam perdagangan, politik budaya, sosial bahkan aspek kehidupan lainnya. Menurut Rod Hague, politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya.

Kini dunia politik bukan lagi dunianya laki-laki akan tetapi politik sudah menjadi hak semua orang untuk dengan leluasa bahkan dengan skillnya berhak berada di dalam dunia politik. Kebijakan penetapan kuota 30 % sesungguhnya telah tegas tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penetapan kuota 30% perempuan dalam pemilu legislatif adalah sebuah affirmative action yang telah lama diperjuangkan oleh aktivis perempuan.²

¹ Budiardjo, Miriam. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Ed. Ke-5). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 16.

² Kertati, Indra. 2014. "Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen". *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. Riptek Vol. 8, No. 1, Tahun 2014, Hal. 19 – 32. Diakses : <http://bappeda.semarangkota.go.id/v2/wp-content/uploads/2015/08/3.-Implementasi-Kuota-indra-kertati.pdf>. tanggal 15 April 2016. Pukul 15.45.

Affirmative action (tindakan afirmatif) adalah kebijakan yang diambil bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama atau sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Affirmative action adalah dorongan peningkatan keterwakilan perempuan dan anggota kelompok minoritas, terutama dalam pekerjaan. ini jelas memberikan peluang besar bagi perempuan dalam berekspresi di ruang publik.

Namun entah mengapa walaupun perempuan diberikan kebebasan serta mendapatkan hak yang sama seperti yang dilakukan kaum laki-laki justru kenyataan perempuan kurang merespon positif serta antusias untuk terjun ke dunia politik kurang. Ini sangat ironis, ketika perempuan memiliki hak yang sama justru perempuan kurang aktif bahkan jarang memanfaatkan peluang yang ada.

Realitas sistem Kuota di Gorontalo 30% tidak sesuai dengan kuota hal ini dapat dilihat dari data statistik, Gorontalo dalam angka tahun 2013 tercatat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo menurut Kabupaten/Kota tahun 2008-2012. Kabupaten Boalemo tercatat anggota DPRD terdiri dari 23 anggota laki-laki dan anggota perempuan 2, Kabupaten Gorontalo, 34 anggota laki-laki dan 6 anggota perempuan, Kabupaten Pohuwato, terdiri dari 19 anggota laki-laki dan 6 anggota perempuan, Kabupaten Bone Bolango terdiri dari 24 anggota laki-laki dan 1 anggota perempuan, Kabupaten Gorontalo Utara terdiri dari 23 anggota laki-laki dan 2 anggota perempuan. Dan untuk Kota

Gorontalo terdiri dari 19 anggota laki-laki dan 6 anggota perempuan³. dan bukan hanya itu saja keterlibatan perempuan dalam partai politik sangat rendah hal ini bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

**Banyaknya Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin
di Provinsi Gorontalo Tahun 2014**

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Boalemo	20	5	25
2.	Gorontalo	27	8	35
3.	Pohuwato	20	5	25
4.	Bone Bolango	24	1	25
5.	Gorontalo Utara	21	4	25
6.	Kota Gorontalo	19	6	25
Provinsi Gorontalo		33	12	45

Sumber : Gorontalo dalam Angka 2015

Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa di Kabupaten Bone Bolango merupakan satu dari beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo yang keterlibatan perempuan dalam politik khususnya pada pemilihan anggota DPRD periode 2014-2019, atas dasar itulah peneliti melakukan penelitian mengenai **“Eksistensi Perempuan Dalam Politik, studi mengenai rekrutmen perempuan dalam politik”**.

³ Gorontalo Dalam Angka 2013.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana Rekrutmen Perempuan Dalam dunia Politik di Kabupaten Bone Bolango ?
2. Mengapa keterlibatan perempuan dalam dunia politik sangat rendah di Kabupaten Bone Bolango?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui rekrutmen perempuan dalam dunia politik di Kabupaten Bone Bolango
2. Untuk menganalisis keterlibatan perempuan dalam politik Sangat rendah di Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini yaitu :

1. Untuk memberikan gambaran mengenai eksistensi perempuan dalam dunia politik di Kabupaten Bone Bolango khususnya
2. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca yang tertarik pada topik yang diteliti oleh penulis.
3. Dapat dipergunakan sebagai referensi oleh penulis lain dalam menulis skripsi yang berhubungan dengan topik seperti yang diteliti oleh penulis.